Siaran Pers Urun Rembug Pustakawan
dalam Tata Kelola Internet di Indonesia

Pendahuluan

Forum Tata Kelola Internet (*Internet Governance Forum* – IGF) seharusnya bukan lagi terminologi asing di kalangan pustakawan. Sejak dibentuknya IGF berdasarkan kesepakatan Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (WSIS – *The World Summit of the Information Society*) pada tahun 2005, berbagai isu terkait dengan tata kelola internet mengemuka. Berbagai macam isu yang berkembang kemudian dikelompokkan dengan istilah keranjang yang sampai saat ini terbagi dalam lima "keranjang"[1]. Setiap keranjang secara spesifik memaparkan problem, tantangan dan tawaran solusi yang saling berkaitan. Jika dilihat seksama, keranjang pembangunan yang paling berkaitan dengan dunia perpustakaan dan informasi. Di dalamnya terdapat pokok bahasan mengenai kesenjangan digital, akses universal, dan strategi mengatasi kesenjangan digital. Ketiga hal tersebut selaras dengan keberadaan fungsi perpustakaan di Indonesia.

Sekilas IGF[2]

Internet Governance Forum (IGF) adalah badan global untuk penanganan isu-isu kebijakan publik internet. Dibentuk pada saat Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Masyarakat Informasi di Tunisia (2005) sebagai kompromi antara pengaturan internet yang berpusat pada pemerintah dengan non-pemerintah. IGF bukanlah forum pembuat keputusan, tetapi forum dialog yang hasilnya diharapkan menjadi landasan pembuatan keputusan. Ia tidak memiliki mandat untuk mengadopsi kesepakatan internasional atau dokumen hukum lainnya. Sampai dengan 2015 IGF telah diselenggarakan 10 kali, dan pada tahun 2013 diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Peran Perpustakaan

Cepatnya perubahan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan berkembangnya media-media baru ijuga ikut mengubah perpustakaan. Perpustakaan tidak bisa lagi hanya diasosiasikan dengan media tercetak seperti buku, koran, atau majalah. Perpustakaan harus bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan ini seraya tetap mempertahankan perannya dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan kepada setiap orang, apapun latar belakangnya.

Salah satu cara untuk mengakses informasi dan pengetahuan tersebut yakni melalui ketersediaan akses internet di perpustakaan. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh perpustakaan. Oleh karena itu peran perpustakaan selalu menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan IGF sebagai isu lintas sektoral di antara beberapa tema kunci yang dibahas di IGF, seperti tata kelola internet dan pembangunan; akses dan keberagaman; keamanan, keterbukaan dan privasi; dan kepemudaan.

Pada IGF tahun 2011, IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) dan EIFL (*Electronic Information for Libraries*), dua organisasi yang merepresentasikan ribuan perpustakaan di

[1] Tentang tata kelola internet: sebuah pengantar. Jovan Kurbalija. Jakarta: APJII, (2010).

[2] Lebih lengkap mengenai IGF http://www.intgovforum.org

seluruh dunia, menginisiasi sebuah diskusi yang membahas peran perpustakaan sebagai tempat di mana masyarakat luas dapat belajar mengenai dunia informasi digital. Bagaimana memanfaatkan akses TIK dan Internet yang disediakan oleh perpustakaan, terutama untuk masyarakat miskin dan marjinal. Ini akan membantu mereka untuk menjembatani kesenjangan digital melalui layanan-layanan perpustakaan yang inovatif. Selanjutnya akan memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan penghidupan ekonomi mereka.

Dalam Agenda Pembangunan PBB 2030, pentingnya akses informasi menjadi satu sasaran dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals* – SDGs). Tidak akan ada pembangunan tanpa adanya akses informasi. Karena itu perpustakaan menjadi kunci dalam memastikan akses informasi, salah satunya melalui internet. Sebagai lembaga publik yang terpercaya yang didanai oleh pembayar pajak dan didukung oleh fasilitas, sumber daya manusia terlatih, dan teknologi, perpustakaan diharapkan dapat menjadi penghubung (*hub*) yang bisa menyediakan akses layanan yang terjangkau dan berperan lebih dalam mewujudkan SDGs ini.

Penetrasi internet di Indonesia

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,7 juta orang atau 51,8% dari total populasi. Namun dari 132,7 juta orang tersebut, sebanyak 86,3 juta orang atau 65% persen berasal dari pulau Jawa saja. APJII pun mengatakan hanya ada peningkatan sedikit jumlah pengguna internet untuk kawasan timur Indonesia. Dari survei tersebut jelas menunjukkan adanya kesenjangan digital antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Di sini perpustakaan dapat ikut mengambil peran untuk menjembatani kesenjangan digital antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Setiap perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, desa, atau bahkan perpustakaan sekolah, dapat memberikan akses internet gratis kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya perpustakaan-perpustakaan tersebut harus dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan internet tersebut sebagai salah satu sarana pencarian informasi atau pengetahuan yang mereka butuhkan.

Selain itu pemanfaatan internet oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga terlihat kecil. Survei APJII mengungkapkan hanya 10,4 juta orang yang memanfaatkan internet untuk bisnis atau berdagang. Penggunaan internet masih didominasi untuk mengakses media sosial dan hiburan. Dalam hal ini perpustakaan dapat mengadakan pelatihan-pelatihan lebih lanjut untuk mengajak para pelaku UKM untuk memanfaatkan internet dalam kegiatan dagangnya. Di sini lah perlunya perpustakaan untuk dapat bekerja sama dengan instansi/organisasi yang berkepentingan lainnya, baik dari pemerintah, kalangan pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Diskusi tentang tata kelola internet memang diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), tidak hanya satu atau dua organisasi saja. Dengan kerja sama ini, maka memungkinkan pemanfaatan internet akan sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan ekonomi di Indonesia.